## SALINAN



## **BUPATI TANAH LAUT** PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 100.3.3.2/ 1159-KUM/2024

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANAH LAUT (SATU DATA TANAH LAUT) **TAHUN ANGGARAN 2024**

### BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut), yang bertujuan untuk menyajikan data dan informasi di Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2024.

### Mengingat

- 1965 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
  Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
  Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah
  Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah
  diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
  Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
  Tahun 2016 tentangg Pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah
  Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
  Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

KESATU

: Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
  - 1. Mengumpulkan dan melakukan penginputan data Statistik Sektoral SKPD yang menjadi kewenangannya kedalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut (http://data.tanahlautkab.go.id)
  - 2. Mempublikasikan dan bertanggung jawab terhadap validitas data dan informasi Statistik Sektoral SKPD yang menjadi kewenangannya kedalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut (http://data.tanahlautkab.go.id)

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari Pada tanggal 9 Juli 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Old Aun

Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

ALFIRIAL SH, MH NIP.19750203 199903 2 008

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2 / 1159-KUM/2024

TANGGAL : 9 Juli 2024

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANAH LAUT (SATU DATA TANAH LAUT) TAHUN ANGGARAN 2024

|     | TARAMAN RAYAM GURRA / INGMANGI  | JABATAN                |
|-----|---|------------------------|
| NO. | JABATAN DALAM SKPD / INSTANSI   | DALAM TIM              |
| 1   | Bupati Tanah Laut   | Pembina                |
| 2   | Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut  | Pengarah               |
| 3   | Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Tanah Laut   | Pengarah               |
| 4   | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah<br>Laut   | Ketua                  |
| 5   | Kabid. Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Kabupaten Tanah Laut                        | Sekretaris             |
| 6   | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten<br>Tanah Laut   | Anggota                |
| 7   | Kabid Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Tanah Laut                                | Anggota                |
| 8   | Kabid. Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Kabupaten Tanah Laut                    | Anggota                |
| 9   | Kasi Pengelolaan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Tanah Laut                             | Anggota                |
| 10  | Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi<br>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut | Anggota                |
| 11  | Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD   | Wali Data              |
|     | Kabupaten Tanah Laut  | Pendukung              |
| 12  | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Laut   | Wali Data<br>Pendukung |
| 13  | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut                       | Wali Data<br>Pendukung |
| 14  | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten<br>Tanah Laut  | Wali Data<br>Pendukung |
| 15  | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten<br>Tanah Laut  | Wali Data<br>Pendukung |
| 16  | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut   | Wali Data Pendukung    |
| 17  | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Tanah Laut                                   | Wali Data<br>Pendukung |
| 18  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanah Laut   | Wali Data<br>Pendukung |
| 19  | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam<br>Kebakaran Kabupaten Tanah Laut                             | Wali Data<br>Pendukung |
| 20  | Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah<br>Laut  | Wali Data<br>Pendukung |

| 21 | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil        | Wali Data  |
|----|---|--|
|    | Kabupaten Tanah Laut                                      | Pendukung  |
| 22 | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut           | Wali Data  |
|    | Demotario Binas nessiman nasapaten ranan saas             | Pendukung  |
| 23 | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten | Wali Data  |
| 20 | Tanah Laut  | Pendukung  |
| 24 | Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan     | Wali Data  |
| 4  | Kabupaten Tanah Laut                                      | Pendukung  |
| 25 | Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut          | Wali Data  |
| 20 | Sekretaris Dinas Fariwisata Kabupaten Tanan Daut          | Pendukung  |
| 26 | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan       | Wali Data  |
| 20 | Pertanahan Kabupaten Tanah Laut                           | Pendukung  |
| 07 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa         | Wali Data  |
| 27 | Kabupaten Tanah Laut                                      | Pendukung  |
| 00 | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu    | Wali Data  |
| 28 | Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut                           | Pendukung  |
| 00 | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten      | Wali Data  |
| 29 | Tanah Laut  | Pendukung  |
|    | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga          | *** 1: 5   |
| 30 | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   | Wali Data  |
|    | Kabupaten Tanah Laut                                      | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 31 | Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut         | Pendukung  |
|    | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten     | Wali Data  |
| 32 | Tanah Laut  | Pendukung  |
|    | Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman      | Wali Data  |
| 33 | dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut                 | Pendukung  |
|    | Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten | Wali Data  |
| 34 | Tanah Laut  | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 35 | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut              | Pendukung  |
|    | Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan          | Wali Data  |
| 36 | Perkebunan Kabupaten Tanah Laut                           | Pendukung  |
|    | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten | Wali Data  |
| 37 | Tanah Laut  | Pendukung  |
|    | Tallett Baat  | Wali Data  |
| 38 | Sekretaris Kecamatan Bajuin                               | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 39 | Sekretaris Kecamatan Bati-Bati                            | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 40 | Sekretaris Kecamatan Batu Ampar                           | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 41 | Sekreatris Kecamatan Bumi Makmur                          | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 42 | Sekretaris Kecamatan Jorong                               | Pendukung  |
|    |   | Wali Data  |
| 43 | Sekretaris Kecamatan Kintap                               | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|    |   | Pendukung  |

| 44 | Sekretaris Kecamatan Kurau                             | Wali Data |
|----|--|-----------|
|    |  | Pendukung |
| 45 | Sekretaris Kecamatan Panyipatan                        | Wali Data |
|    |  | Pendukung |
| 46 | Sekretaris Kecamatan Pelaihari                         | Wali Data |
|    |  | Pendukung |
| 47 | Sekretaris Kecamatan Takisung                          | Wali Data |
|    |  | Pendukung |
| 48 | Sekretaris Kecamatan Tambang Ulang                     | Wali Data |
|    |  | Pendukung |
| 49 | Nurul Ni'mah, S.Tr.Stat (Pranata Komputer Ahli Pertama | Anggota   |
|    | Badan Pusat Statistik)                                 |           |
| 50 | Pegawai Tidak Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika   | Anggota   |
|    | Kabupaten Tanah Laut (2 orang)                         |           |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

al fruit

ALFIRIAL, SH, MH NIP.19750203 199903 2 008 Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN